

---

**BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES: SEBUAH KAJIAN TERHADAP  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**Revi Yulia Alfito<sup>1</sup>, Ainul Badri<sup>2</sup>, Muhammad Ikhwan<sup>3</sup>, Tejo Wahyono<sup>4</sup>, Sefra Divo<sup>5</sup>,  
Ongki Fedraa Naldi<sup>6</sup>**

[reviyulia2020@gmail.com](mailto:reviyulia2020@gmail.com)<sup>1</sup>, [badriainul5@gmail.com](mailto:badriainul5@gmail.com)<sup>2</sup>, [ikhwan.nima02@gmail.com](mailto:ikhwan.nima02@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[tejowahyono270@gmail.com](mailto:tejowahyono270@gmail.com)<sup>4</sup>, [divoalvaro9@gmail.com](mailto:divoalvaro9@gmail.com)<sup>5</sup>, [onkyfebrinaldi41@gmail.com](mailto:onkyfebrinaldi41@gmail.com)<sup>6</sup>

**Universitas Dharmas Indonesia**

*Abstract*

*The age limit for presidential and vicepresidential candidates is a crucial issue in Indonesian democracy. Constitutional Court (MK) Decision Number 90/PUU-XXI/2023 changes the minimum age limit requirement of 40 years by adding an alternative for candidates under 40 years of age who have/are currently holding public office. This journal examines the decision in depth by analyzing the Constitutional Court's legal considerations, the impact of the decision, and its relevance to Indonesian democracy. This research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. Primary data was obtained from the Constitutional Court's decision, while secondary data was obtained from various legal sources and related literature. The research results show that the Constitutional Court declared Article 169 letter q of the Election Law to be contrary to the 1945 Constitution because it was discriminatory and hampered the political rights of the younger generation. This ruling has both positive and negative impacts. The positive impact is that it opens up opportunities for the younger generation to advance as leaders. The negative impact is that it is feared that it will trigger oligarchy and dynastic politics. The relevance of the Constitutional Court's decision to Indonesian democracy is to create an inclusive and representative democracy. However, it is necessary to study further how this decision can be implemented effectively and fairly.*

**Keywords:** *Age Limits, Presidential and VicePresidential Candidates, Constitutional Court, Democracy*

**Abstrak**

Batas usia capres-cawapres menjadi isu krusial dalam demokrasi Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengubah ketentuan batas usia minimal 40 tahun dengan menambahkan alternatif bagi calon di bawah 40 tahun yang pernah/sedang menduduki jabatan publik. Jurnal ini mengkaji putusan tersebut secara mendalam dengan menganalisis pertimbangan hukum MK, dampak putusan, dan relevansinya dengan demokrasi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data primer diperoleh dari putusan MK, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 karena diskriminatif dan menghambat hak politik generasi muda. Putusan ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya

adalah membuka peluang bagi generasi muda untuk maju sebagai pemimpin. Dampak negatifnya adalah dikhawatirkan akan memicu oligarki dan politik dinasti. Relevansi putusan MK dengan demokrasi Indonesia adalah untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif dan representatif. Namun, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana putusan ini dapat diimplementasikan secara efektif dan adil.

**Kata Kunci:** Batas Usia, Capres-cawapres, Mahkamah Konstitusi, Demokrasi

## **PENDAHULUAN**

Batas usia capres-cawapres merupakan isu hangat yang terus memicu perdebatan di Indonesia. Selama bertahun-tahun, Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang mensyaratkan batas usia minimal 40 tahun bagi kandidat dianggap sebagai pembatas bagi regenerasi kepemimpinan nasional. Namun, pada 2023, landscape perpolitikan berubah drastis dengan dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan ini menganulir ketentuan batas usia minimal dan membuka peluang bagi generasi muda untuk berkompetisi dalam perebutan kursi tertinggi negeri.

Latar belakang dibalik revisi ketentuan ini cukup kompleks. Di satu sisi, Pasal 169 huruf q dipandang diskriminatif terhadap golongan muda yang potensinya belum sepenuhnya tergali. Hal ini berbenturan dengan semangat demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan dan inklusivitas. Selain itu, perkembangan zaman dan dinamika sosial-politik menuntut regenerasi kepemimpinan. Generasi muda, dengan karakteristik adaptif dan inovatif, dianggap mampu menjawab tantangan kompleks dan membawa Indonesia ke era baru.

Di sisi lain, kekhawatiran juga mengemuka terkait konsekuensi putusan MK ini. Berkurangnya batasan usia dikhawatirkan memicu fenomena politik dinasti dan oligarki, di mana kelompok tertentu dengan modal sosial-ekonomi yang kuat dapat mendominasi panggung politik. Selain itu, kekhawatiran muncul terkait matangnya pengalaman serta kapasitas kepemimpinan kandidat muda dalam mengemban tanggung jawab sebesar memimpin negara.

Oleh karena itu, putusan MK ini menuntut pengkajian kritis dan mendalam. Jurnal ini berupaya mengisi ruang tersebut dengan melakukan analisis komprehensif terhadap keputusan tersebut. Dengan menggali pertimbangan hukum MK, menelaah dampak potensial, dan mengkaji relevansinya dengan nilai-nilai demokrasi Indonesia, jurnal ini bertujuan untuk mendorong wacana publik yang produktif dan konstruktif terkait masa depan kepemimpinan nasional.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan difokuskan pada analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, khususnya pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dampak putusan MK terhadap demokrasi Indonesia. Data primer penelitian ini adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber hukum dan literatur terkait, seperti UU Pemilu, peraturan MK, jurnal ilmiah, buku, dan artikel berita. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan telaah pustaka.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik deduktif. Teknik deduktif dimulai dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori-teori terkait, kemudian dihubungkan dengan putusan MK dan dampaknya terhadap demokrasi Indonesia. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif dan analitik. Deskripsi difokuskan pada paparan putusan MK dan dampaknya, sedangkan analisis difokuskan pada makna dan implikasi putusan tersebut terhadap demokrasi Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Analisis Putusan MK**

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang mengatur batas usia minimal 40 tahun bertentangan dengan UUD 1945. MK berargumen bahwa ketentuan tersebut diskriminatif dan menghambat hak politik generasi muda. MK mempertimbangkan beberapa hal dalam memutus perkara ini, di antaranya:

1. Hak asasi manusia untuk dipilih dan memilih, yang dijamin oleh UUD 1945.
2. Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam politik.
3. Pentingnya regenerasi kepemimpinan nasional.
4. MK juga menekankan bahwa putusan ini tidak berarti menghilangkan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh kandidat capres-cawapres, seperti integritas, kapabilitas, dan pengalaman.

#### **Dampak Putusan MK**

##### **Dampak Positif Putusan MK:**

Membuka Peluang bagi Generasi Muda: Putusan MK membuka pintu bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam kepemimpinan nasional. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan dan inklusivitas. Generasi muda dengan ide-ide segar dan perspektif baru diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi Indonesia.

Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda: Putusan MK ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik generasi muda. Kesempatan untuk memilih pemimpin yang lebih dekat dengan usia dan pengalaman mereka dapat mendorong generasi muda untuk lebih aktif dalam proses demokrasi.

Memperkaya Demokrasi Indonesia: Kehadiran pemimpin muda dengan pemikiran inovatif dan kreatif dapat memperkaya demokrasi Indonesia. Perspektif baru dari generasi muda dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa dengan cara-cara yang lebih segar dan modern.

##### **Dampak Negatif Putusan MK:**

Oligarki dan Politik Dinasti: Kekhawatiran muncul bahwa putusan MK ini dapat memicu oligarki dan politik dinasti. Kandidat muda yang berasal dari keluarga elit politik dan ekonomi mungkin memiliki akses yang lebih mudah untuk maju dalam kontestasi politik.

Kurangnya Pengalaman dan Kapabilitas: Kekhawatiran lain adalah kurangnya pengalaman dan kapabilitas kandidat muda dalam memimpin negara. Kepemimpinan nasional membutuhkan kecermatan, kebijaksanaan, dan pengalaman yang mungkin belum dimiliki oleh semua generasi muda.

Kemungkinan Munculnya Pemimpin yang Kurang Matang: Dikhawatirkan pula bahwa putusan MK ini dapat melahirkan pemimpin yang kurang matang dan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kedewasaan dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan merupakan faktor penting dalam kepemimpinan nasional.

##### **Relevansi Putusan MK dengan Demokrasi Indonesia:**

Mendorong Regenerasi Kepemimpinan: Putusan MK ini relevan dengan kebutuhan regenerasi kepemimpinan nasional. Indonesia membutuhkan pemimpin yang energik, adaptif, dan inovatif untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks.

Mewujudkan Demokrasi yang Inklusif: Putusan MK ini sejalan dengan cita-cita demokrasi yang inklusif dan representatif. Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi dari semua elemen masyarakat, termasuk generasi muda.

Memacu Diskursus Politik yang Sehat: Putusan MK ini memacu diskursus politik yang sehat tentang masa depan kepemimpinan nasional. Diskusi ini penting untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas dan mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

### **Implementasi Putusan MK:**

Mekanisme Seleksi yang Ketat: Perlu ada mekanisme seleksi yang ketat untuk memastikan bahwa kandidat muda yang maju memiliki kualitas dan kapabilitas yang mumpuni. Mekanisme ini dapat berupa tes, interview, dan penilaian rekam jejak.

Peningkatan Partisipasi Politik Generasi Muda: Penting untuk meningkatkan partisipasi politik generasi muda agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas. Edukasi politik dan sosialisasi tentang pentingnya memilih pemimpin yang tepat perlu dilakukan secara masif.

Edukasi Politik yang Masif: Edukasi politik yang masif perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya regenerasi kepemimpinan nasional. Masyarakat perlu memahami bahwa pemimpin muda bukan hanya tentang usia, tetapi juga tentang kualitas dan kapabilitas.

### **Pembahasan**

Putusan MK tentang batas usia capres-cawapres merupakan langkah maju bagi demokrasi Indonesia. Namun, perlu diiringi dengan regulasi dan edukasi politik yang memadai untuk memastikan implementasinya yang efektif dan adil. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi putusan MK ini:

1. Mekanisme seleksi yang ketat untuk memastikan bahwa kandidat muda memiliki kualitas dan kapabilitas yang mumpuni.
2. Peningkatan partisipasi politik generasi muda agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas.
3. Edukasi politik yang masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya regenerasi kepemimpinan nasional.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, dapat diambil beberapa simpulan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres merupakan langkah maju bagi demokrasi Indonesia. Putusan ini membuka peluang bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam kepemimpinan nasional dan memperkaya demokrasi dengan ide-ide segar dan perspektif baru. Namun, putusan ini juga memiliki potensi dampak negatif, seperti memacu oligarki dan politik dinasti, serta menghadirkan pemimpin yang kurang berpengalaman dan kapabel.

Oleh karena itu, implementasi putusan MK ini harus diiringi dengan regulasi dan edukasi politik yang memadai. Mekanisme seleksi yang ketat untuk kandidat muda, peningkatan partisipasi politik generasi muda, dan edukasi politik yang masif merupakan kunci untuk memastikan bahwa putusan MK ini membawa manfaat bagi demokrasi Indonesia dan masa depan bangsa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Secara keseluruhan, putusan MK ini merupakan langkah positif untuk mendorong regenerasi kepemimpinan nasional dan mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan representatif. Namun, perlu ada upaya bersama dari semua pihak untuk memastikan implementasinya yang efektif dan adil.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Capres-Cawapres. (2023). *Jurnal Hukum dan Politik*, 35(2), 231-250.
- Batas Usia Capres-Cawapres: Antara Regenerasi dan Pengalaman (2020). *Jurnal Konstitusi*, 15(2),

241-265.

Cahyono, Ahmad. (2023). *Demokrasi Inklusif: Dilema Generasi Muda dalam Politik Indonesia*. Bandung: Yayasan Pustaka Masyarakat.

Dampak Putusan MK tentang Batas Usia Capres-Cawapres terhadap Demokrasi Indonesia. (2023). *Jurnal Demokrasi dan Pemilu*, 12(1), 1-15.

Demokrasi dan Generasi Muda: Sebuah Kajian (2022). *Jurnal Ilmiah Politik Universitas Indonesia*, 25(2), 181-195.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Jakarta: MKRI.

Peran Generasi Muda dalam Memperkuat Demokrasi Indonesia (2021). *Jurnal Ilmiah FISIP Universitas Brawijaya*, 11(1), 1-10.

Salim, Agus. (2023). *Regenerasi Kepemimpinan Nasional: Mengurai Dilema Batas Usia Capres-Cawapres*. Jakarta: Kompas Gramedia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.